



ASPEK HUKUM **EKONOMI** *dan* **BISNIS**



EDITOR:

**Shidarta • Abdul Rasyid
Ahmad Sofian**

ASPEK HUKUM EKONOMI *dan* BISNIS

Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, sebagaimana yang telah diatur dan diubah dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, bahwa:

Kutipan Pasal 113

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,- (empat miliar rupiah).

ASPEK HUKUM EKONOMI *dan* BISNIS

Editor:

Shidarta

Abdul Rasyid

Ahmad Sofian



ASPEK HUKUM EKONOMI & BISNIS

Edisi Pertama

Copyright © 2018

ISBN : 978-602-422-692-3

ISBN (E) : 978-602-422-843-9

15 x 23 cm

xviii, 368 hlm

Cetakan ke-1, September 2018

Kencana. 2018.0973

Editor

Shidarta, Abdul Rasyid, Ahmad Sofian

Penulis

Shidarta Erni Herawati

Abdul Rasyid Agus Riyanto

Ahmad Sofian Erna Ratnaningsih

Bambang Pratama Nirmala Many

Besar Siti Yuniarti

Richard Burton Iron Sarira

Desain Sampul

Irfan Fahmi

Penata Letak

Witnasari

Penerbit

K E N C A N A

(Divisi dari PRENADAMEDIA Group)

Jl. Tandra Raya No. 23 Rawamangun - Jakarta 13220

Telp: (021) 478-64657 Faks: (021) 475-4134

e-mail: pmg@prenadamedia.com

www.prenadamedia.com

INDONESIA

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apa pun,
termasuk dengan cara penggunaan mesin fotokopi, tanpa izin sah dari penerbit.

DAFTAR SINGKATAN

ASEAN	: Association of Southeast Asian Nations
AEC	: ASEAN Economic Community
BAPEPAM	: Badan Pengawas Pasar Modal
BPHN	: Badan Pembinaan Hukum Nasional
IS	: <i>Indische Staatsregeling</i>
JPN	: Jaksa Pengacara Negara
Kemenkumham	: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
KUHD	: Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
KUH Perdata	: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
MA	: Mahkamah Agung
MK	: Mahkamah Konstitusi
OJK	: Otoritas Jasa Keuangan
PERPU	: Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
PK	: Peninjauan Kembali
PKPU	: Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
PP	: Peraturan Pemerintah
PT	: Perseroan Terbatas
Rv	: <i>Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering</i>
RR	: <i>Regeringsreglement</i>
RUPS	: Rapat Umum Pemegang Saham
UU	: Undang-Undang
UNCITRAL	: United Nations Commission on International Trade Law
UUKPKPU	: Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
WvK	: <i>Wetboek van Koophandel</i>

KATA PENGANTAR

Buku ini merupakan penyempurnaan yang cukup komprehensif terhadap karya yang pernah terbit sekitar tiga tahun lalu oleh penerbit PT Widia Inovasi Nusantara. Ada beberapa alasan untuk membuat penyempurnaan atas buku ini. *Pertama*, karya yang pernah dipublikasikan beberapa tahun lalu ternyata hanya dapat dibaca oleh kalangan terbatas karena sirkulasi buku tersebut tidak mampu menjangkau khalayak luas. *Kedua*, ada banyak sekali perkembangan dalam lapangan hukum ekonomi dan bisnis yang terjadi akhir-akhir ini, sehingga isi buku itu sangat perlu untuk ditambah dan dielaborasi. Tentu saja melalui bantuan penerbit PrenadaMedia Group, disemat harapan para penulis agar misi awal dari hadirnya buku ini benar-benar dapat tercapai, yaitu memberi pencerahan bagi para pembelajar hukum bisnis dan khalayak pembaca seluas-luasnya.

Patut dicatat bahwa hukum bisnis (*business law*) merupakan sebuah label yang seksi untuk dilekatkan di banyak tempat. Hukum bisnis dapat menjadi nama matakuliah yang menarik, bahkan bisa menjadi nomenklatur sebuah jurusan atau program studi. Hal ini misalnya berlaku pada Jurusan Hukum Bisnis (*Business Law Departement*) Universitas Bina Nusantara (BINUS), yang dosen-dosennya berdedikasi menuangkan pikiran-pikiran mereka di dalam buku ini. Dalam konteks inilah, sebuah buku pegangan yang relevan untuk kepentingan tersebut perlu dihadirkan, tidak hanya untuk kalangan internal mahasiswa hukum, melainkan juga untuk kalangan pembaca pada umumnya. Di sisi lain, pengajaran dan penelitian di bidang hukum bisnis juga berkembang di banyak tempat. Mahasiswa peserta didik dari fakultas atau jurusan di luar hukum pun, tidak sedikit yang membutuhkan literatur yang memadai dalam area hukum ini, sehingga mereka juga sangat menunggu kehadiran buku-buku yang dikemas secara serius seputar topik ini.

Sasaran utama pembaca buku ini adalah mahasiswa-mahasiswa hukum dan nonhukum yang ingin mendapatkan gambaran garis besar

tentang aspek-aspek hukum dalam bisnis di Indonesia. Bagi mahasiswa penstudi ilmu hukum, buku ini dapat digunakan untuk mendukung pengajaran matakuliah *Pengantar Hukum Indonesia*, ketika materi sudah memasuki bidang kajian yang lebih spesifik sebagai “pecahan” dari hukum perdata dan hukum dagang. Bagi mahasiswa penstudi nonhukum (Fakultas Ekonomi), buku ini dapat dijadikan buku teks utama untuk matakuliah aspek hukum dalam ekonomi atau matakuliah sejenis.

Jika mengacu pada buku-buku serupa yang beredar di sejumlah negara berbahasa Inggris, materi buku demikian selalu diawali dengan pengantar umum (*general introduction*) tentang sistem hukum di negara yang bersangkutan. Pengantar ini penting sebagai pintu masuk bagi pembaca yang baru pertama kali berkenalan dengan isu-isu hukum. Baru kemudian mereka dibawa memasuki topik tentang hukum kontrak, hukum perusahaan, hukum pembiayaan, hukum asuransi, hukum ketenagakerjaan, dan biasanya diakhiri dengan hukum kepailitan. Sebagai contoh dapat ditunjukkan sistematika yang tercantum dalam buku-buku “klasik” sebagai berikut:

Judul: Business Law	Judul: Business Law and the Regulatory Environment	Judul: The Legal Aspects of Industry and Commerce
Pengarang: Anderson & Kumpf (1972)	Pengarang: Barnes (1982)	Pengarang
3. Contracts	system 2. Crimes and torts 3. Contracts	instruments
8. Security devices and insurance	7. Property	7. Joint stock companies
environment 12. Estates and bankruptcy 13. Government and business	10. Credit	wages work



Beberapa buku yang lebih terbit lebih belakangan atau edisi revisi sampai tahun 2000 ke atas, ternyata tetap mempertahankan topik-topik konvensional seperti di atas, hanya saja ditambahkan sejumlah topik kontemporer, misalnya tentang etika bisnis, perlindungan konsumen, dan persaingan usaha. Kendati demikian, topik tentang hukum perjanjian tampaknya menempati porsi ulasan paling banyak.

Judul: Business law	Judul: Understanding Business Law	Judul: Business Law: Text & Summarized Cases (Legal, Ethical, Global, and Corporate Environment)
Pengarang:	Pengarang: Pentony, Graw, Lennard, & Parker (2010)	Pengarang:
<p>7. Contract: an overview</p> <p>9. Terms of contract</p> <p>contract</p> <p>13. Privity and assignment</p> <p>goods</p> <p>20. Property</p> <p>22. Trusts</p> <p>23. Succession</p> <p>30. Bankruptcy</p>	<p>court system</p> <p>true agreement</p> <p>trading</p> <p>11. Consumer credit</p> <p>14. Agency</p> <p>16. Trusts</p> <p>17. Companies</p> <p>18. Property</p> <p>21. Insurance</p> <p>and banking</p> <p>money</p>	<p>of business</p> <p>2. Torts and crimes</p> <p>3. Contracts and e-contracts</p> <p>bankruptcy</p> <p>7. Agency and</p> <p>10. Property and its</p>



Mengingat luasnya cakupan area hukum bisnis itu, buku ini mengambil sikap realistis untuk membuat sistematika yang lebih sederhana dengan membuat empat pengelompokan substansial. Kelompok pertama terdiri dari tulisan tentang sistem hukum Indonesia yang didudukkan sebagai penuntun bagi pembaca, khususnya bagi mereka yang sebelumnya tidak memiliki latar belakang pendidikan hukum. Kelompok kedua mencakup bab-bab yang membahas materi hukum bisnis secara garis besar, tetapi diusahakan cukup memadai untuk memberikan pemahaman yang relatif lengkap. Hal-hal yang perlu diberikan penekanan pada tiap-tiap bab ini adalah tentang latar belakang munculnya area hukum tersebut, siapa saja subjek hukum yang berkepentingan (kalau pebisnis, siapa saja mereka itu), di mana materi hukum itu diatur dalam khazanah hukum Indonesia, apa saja hak dan kewajiban para subjek hukum yang terlibat di sana, serta asas-asas hukum apa yang penting dipahami dalam bidang hukum ini. Kelompok berikutnya membahas sistem penyelesaian sengketa dengan menggunakan mekanisme di pengadilan dan luar pengadilan. Kelompok terakhir berupa bahasan tentang etika bisnis, mulai dari pengertian, dan arti pentingnya sebagai ketentuan normatif di samping hukum positif.

Besar harapan para penulis agar buku ini dapat mengisi kebutuhan literatur tentang hukum bisnis, khususnya bagi mereka yang memosisikannya sebagai bacaan awal. Akhir kata, patut disampaikan penghargaan kepada rekan-rekan dosen di Jurusan Hukum Bisnis BINUS atas partisipasi dan dukungannya dalam penerbitan ini. Demikian juga kepada rekan-rekan dari Penerbit PrenadaMedia Group yang telah mendorong terbitnya buku ini. Tanpa desakan mereka, tak mungkin buku ini dapat sampai di tangan pembaca. Terima kasih dan selamat menyimak!

Jakarta, April 2018



DAFTAR ISI

DAFTAR SINGKATAN	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	xi

1

PEMAHAMAN SEKILAS TENTANG SISTEM HUKUM INDONESIA

–Shidarta–	1
A. Pengertian tentang Hukum	1
B. Pengertian Sistem Hukum	2
C. Latar Belakang Sejarah Sistem Hukum Indonesia	6
D. Sumber Materiel Hukum Indonesia	12
E. Sumber Formal Hukum Indonesia	17
F. Hukum Bisnis.....	23
G. Penutup	26
DAFTAR PUSTAKA	28

2

HUKUM BENDA –Siti Yuniarti–

A. Pendahuluan.....	31
B. Sistematika Hukum Benda	33
C. Jenis Benda.....	33
1. <i>Bezit</i> (Kedudukan Berkuasa)	35
2. <i>Levering</i> (Penyerahan)	36
3. <i>Verjaring</i> (Kedaluwarsa/Lewat Waktu)	36
4. <i>Bezwarning</i> (Pembebasan/Jaminan)	36
D. Asas-asas dalam Hukum Benda.....	36
E. Hak Kebendaan	37
F. Hak Kebendaan yang Memberikan Kenikmatan	38
G. Hak Kebendaan yang Memberikan Jaminan	39
1. Gadai	40

2. Hipotek	41
3. Hak Tanggungan	41
4. Fidusia	42
5. Jaminan Resi Gudang	42
H. Penutup	43
DAFTAR PUSTAKA	45

3

HUKUM PERJANJIAN –Erni Herawati–	47
A. Pendahuluan	47
B. Pengertian Perjanjian	47
C. Asas-Asas Perjanjian	49
1. Asas Konsensualisme	49
2. Asas Kebebasan Berkontrak	50
3. Asas <i>Pacta Sunt Servanda</i> / Kekuatan Mengikat Suatu Kontrak	50
4. Asas Iktikad baik	50
D. Syarat Sah Perjanjian	51
E. Perikatan	56
F. Prestasi dan Wanprestasi	57
G. Hapusnya Perikatan	59
DAFTAR PUSTAKA	60

4

HUKUM PERUSAHAAN –Erni Herawati–	61
A. Pendahuluan	61
B. Jenis Perusahaan	62
1. Usaha Perorangan	64
2. Perusahaan Bukan Badan Hukum	65
a. Persekutuan Perdata (<i>Maatschap</i>)	65
b. Firma	66
c. Perseroan Komanditer (<i>Commanditaire Vennootschap</i> /CV)	67
3. Perusahaan berbadan hukum: Perseroan Terbatas (PT)	69
a. Definisi Perseroan Terbatas	69
b. Syarat-syarat Pendirian Perseroan Terbatas	70
c. Organ Perseroan Terbatas	71
C. Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Pemisahan	74
DAFTAR PUSTAKA	76



5

HUKUM KEKAYAAN INTELEKTUAL –<i>Besar</i>–	77
A. Pengertian	77
B. Dasar Hukum	78
C. Jenis-jenis Kekayaan Intelektual	78
D. Hak Cipta.....	80
1. Pengertian Hak Cipta.....	80
2. Dasar Hukum Hak Cipta	81
3. Objek Hak Cipta	81
4. Batasan Terhadap Pemberian Hak Cipta.....	82
5. Perlindungan Hukum Hak Cipta	84
6. Prosedur Pendaftaran Hak Cipta.....	84
E. Paten	85
1. Pengertian Paten	85
2. Objek Hak Paten.....	86
3. Perlindungan Hukum Bagi Hak Paten	86
4. Prosedur Permohonan Pendaftaran Paten	87
F. Merek	87
1. Pengertian Hak Merek	87
2. Batasan Terhadap Merek	88
3. Permohonan Merek yang ditolak	88
4. Perlindungan Hukum Merek	89
5. Prosedur atau Tata Cara Pendaftaran Merek	89
G. Desain Industri	90
1. Pengertian Desain Industri	90
2. Lingkup Desain Industri.....	90
3. Perlindungan Hukum Terhadap Desain Industri	91
4. Pendaftaran Desain Industri.....	91
F. Rahasia Dagang.....	92
1. Pengertian Rahasia Dagang	92
2. Lingkup Rahasia Dagang.....	92
3. Perlindungan Hukum Rahasia Dagang.....	92

6

HUKUM KETENAGAKERJAAN –<i>Erna Ratnaningsih dan Iron Sarira</i>–	95
A. Pengantar	95
B. Pengertian dan Kedudukan Hukum Ketenagakerjaan.....	96
1. Pengertian Hukum Ketenagakerjaan	96
2. Kedudukan Hukum Ketenagakerjaan	98
a. Hukum Ketenagakerjaan ditinjau dari Hukum Perdata	99



b.	Hukum Ketenagakerjaan Ditinjau dari Hukum Pidana	101
c.	Hukum Ketenagakerjaan Ditinjau dari Hukum Tata Usaha Negara	103
C.	Hukum Positif di Bidang Ketenagakerjaan.....	105
1.	Konstitusi dan Peraturan Perundang-undangan Tentang Ketenagakerjaan.....	105
2.	Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Hukum Ketenagakerjaan.....	106
D.	Syarat Kerja dan Perjanjian Kerja dalam Hubungan Kerja	108
1.	Syarat Kerja (Mikro Kondisional)	108
a.	Unsur Adanya Pekerjaan	109
b.	Unsur Adanya Upah.....	109
c.	Unsur Adanya Perintah.....	110
d.	Unsur Adanya Waktu Tertentu	110
2.	Perjanjian Kerja	111
E.	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	113
1.	Hubungan Industrial dan Perselisihan Hubungan Industrial	113
2.	Pemutusan Hubungan Kerja dan Larangan PHK.....	116
a.	Pemutusan Hubungan Kerja oleh Pengusaha/Majikan ...	116
b.	Pemutusan Hubungan Kerja oleh Buruh.....	116
c.	Pemutusan Hubungan Kerja Demi Hukum.....	117
d.	Pemutusan Hubungan Kerja oleh Pengadilan.....	117
3.	Hak Buruh Setelah PHK.....	119
4.	Penyelesaian Perselisihan Ketenagakerjaan/Perburuhan	121
a.	Penyelesaian Perselisihan di Luar Pengadilan.....	122
b.	Penyelesaian Perselisihan Melalui Pengadilan.....	124
	DAFTAR PUSTAKA	126

7

HUKUM PASAR MODAL DI INDONESIA –Agus Ryanto–	127
A. Latar Belakang	127
B. Dasar Hukum Pasar Modal	128
C. Hukum Pasar Modal dan Instrumennya di Pasar Modal.....	131
1. Apakah Hukum Pasar Modal itu?	131
2. Instrumen Pasar Modal	132
3. Kelembagaan di Pasar Modal Indonesia.....	133
a. Otoritas Jasa Keuangan (OJK).....	134
b. Bursa Efek Indonesia (BEI)	134
E. Penawaran Umum dan Pencatatan Saham di BEI	135



1. Penawaran Umum	136
a. Tahap Pra-Emisi	137
b. Tahap Emisi	138
c. Tahap Pasca Emisi	138
2. Pencatatan Saham di BEI	139
F. Menjadi Perusahaan Publik Dengan Keterbukaan Informasi	142
G. Aksi Korporasi (<i>Corporate Action</i>)	146
H. Penegakan Hukum di Pasar Modal	147
1. Kejahatan di Pasar Modal	148
a. Informasi yang Menyesatkan (<i>Misleading Information</i>) ...	148
b. Penipuan (<i>Fraud</i>)	149
c. Manipulasi Pasar (<i>Market Manipulation</i>)	150
d. Perdagangan Orang Dalam (<i>Insider Trading</i>)	151
2. Pelanggaran di Pasar Modal	151

8

HUKUM PERSAINGAN USAHA –Shidarta–	155
A. Pendahuluan	155
B. Filosofi UU No. 5 Tahun 1999	156
C. Pendekatan <i>Per Se Illegal</i> dan <i>Rule of Reason</i>	158
D. Anatomi UU No. 5 Tahun 1999	160
E. Sanksi	165
F. Lembaga KPPU	166
G. Prosedur Beracara di KPPU	167
H. Penutup	175
DAFTAR PUSTAKA	176

9

HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN –Shidarta–	177
A. Pengantar	177
B. Subjek-subjek Hukum Perlindungan Konsumen	177
1. Konsumen dan Kelompok Konsumen	177
2. Pelaku Usaha	180
3. Asosiasi Pelaku Usaha	182
4. Kementerian Perdagangan	184
5. Badan Perlindungan Konsumen Nasional	185
6. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat	188
7. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen	189
8. Peradilan	191
C. Pemetaan	194



D. Prinsip-prinsip Hukum Perlindungan Konsumen	196
1. Kontrak Bukan Syarat	196
2. Small Claim.....	196
3. Gugatan Perwakilan Kelompok	197
4. Gugatan LPKSM	197
5. Tanggung Jawab dengan Beban Pembuktian Terbalik	198
E. Isu Penting dalam Perlindungan Konsumen	198
F. Penutup	199
DAFTAR PUSTAKA	200

10

HUKUM KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN

PEMBAYARAN UTANG (PKPU) –Nirmala Many–	201
A. Pendahuluan.....	201
B. Sejarah Hukum Kepailitan	202
C. Definisi Kepailitan	204
D. Tujuan UUKPKPU	205
E. Asas-asas Kepailitan	206
F. Prosedur Kepailitan	206
G. Akibat Putusan Pailit	213
H. Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit.....	214
I. Berakhirnya Kepailitan.....	214
J. Peran Pengadilan Niaga	214
K. Perjanjian Internasional tentang Kepailitan	215
L. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)	216
1. Pengertian dan Perbedaan antara PKPU dan Kepailitan	216
2. Jenis-jenis PKPU	217
a. PKPU Sementara	217
b. PKPU Tetap.....	217
3. Hakim Pengawas dan Pengurus	218
4. Panitia Kreditur	218
5. Status Sita dan Eksekusi Jaminan.....	218
6. Pembayaran Utang Selama Berlangsungnya PKPU.....	218
7. Kompensasi Utang dalam PKPU	219
8. Akibat Permohonan PKPU Tetap Ditolak.....	219
9. Berakhirnya PKPU	219
M. Penutup	219
DAFTAR PUSTAKA	221



11

HUKUM PAJAK –Richard Burton–	223
A. Pengantar	223
B. Pajak untuk Keadilan.....	226
C. Penegakan Hukum Pajak	228
D. Subjek Pajak dan Objek Pajak.....	230
E. Upaya Hukum Wajib Pajak	234
F. Sekilas Kasus Hukum Pajak	236
DAFTAR PUSTAKA	238

12

PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS DI LUAR PENGADILAN	
–Abdul Rasyid–	239
A. Pendahuluan.....	239
B. Sejarah Singkat Penyelesaian Sengketa	240
C. Definisi Alternatif Penyelesaian Sengketa	241
D. Model Alternatif Penyelesaian Sengketa	244
1. Negosiasi	244
2. Mediasi.....	246
3. Arbitrase.....	250
DAFTAR PUSTAKA	253

13

ETIKA BISNIS –Shidarta–	255
A. Pendahuluan.....	255
B. Nilai, Asas, dan Norma.....	256
C. Pembentukan “Autonomic Legislation”	259
D. Etika Bisnis sebagai “Autonomic Legislation”	263
E. Penutup	269
DAFTAR PUSTAKA	270

14

IMPLIKASI ETIS DALAM BISNIS: DALAM KONTEKS HUKUM	
PARIWISATA –Ahmad Sofian–	271
A. Pendahuluan	271
B. Pengertian Pariwisata Seks Anak.....	272
C. Situasi Global Pariwisata Seks Anak.....	274
D. Pelaku Kejahatan Seks Anak	277



1. Wisatawan Seks Anak Situasional (<i>Situational Sex Offender</i>)	278
2. Wisatawan Seks Anak Preferensial (<i>Preferential Sex Offenders</i>)	278
3. Pedofil (<i>Pedophile</i>)	278
E. Instrument Hukum Internasional tentang Pariwisata Seks Anak	279
F. Perundang-Undangan Nasional	288
DAFTAR PUSTAKA	292

15

TINDAK PIDANA BISNIS –Ahmad Sofian–	295
A. Pendahuluan	295
B. Tindak Pidana Perpajakan	297
C. Tindak Pidana Korupsi	307
D. Tindak Pidana Pencucian Uang	309
E. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi	313
1. Kejahatan Korporasi	313
2. Pelanggaran HAM oleh Korporasi	315
3. Instrumen Hukum Pelanggaran HAM	318
4. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi	319
DAFTAR PUSTAKA	322

16

HUKUM SIBER INDONESIA ANTARA HARAPAN DAN KENYATAAN –Bambang Pratama–	325
A. Tinjauan Umum	325
B. Ruang Lingkup Hukum Siber di Indonesia	329
C. UU-ITE dan Cakupannya	330
1. Konsep Kepemilikan dalam Ruang Siber	332
2. Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual pada UU-ITE	333
3. Pengaturan Persaingan Usaha pada UU-ITE	334
4. Pengaturan Perlindungan Konsumen pada UU-ITE	335
D. Sumbangan Pemikiran untuk UU-ITE ke Depan	337
E. Penutup	339
DAFTAR PUSTAKA	340
GLOSARIUM	343
PARA PENULIS	365

PEMAHAMAN SEKILAS TENTANG SISTEM HUKUM INDONESIA

Shidarta

A. PENGERTIAN TENTANG HUKUM

Apakah hukum itu? Pertanyaan ini sederhana, tetapi tidak mudah dijawab karena ternyata ada demikian banyak definisi dapat diberikan terhadap hukum itu. Masyarakat mengartikan hukum menurut kepentingan dan kebutuhan mereka masing-masing.

Banyak orang mengartikan hukum sebagai aturan yang dibuat oleh penguasa negara, antara lain dalam bentuk undang-undang. Tentu saja pemaknaan seperti ini tidak salah, tetapi tidak cukup luas. Hukum tidak hanya aturan yang dibuat oleh negara. Hukum juga adalah nilai-nilai dan asas-asas yang sudah ada sebelum dibuat menjadi undang-undang. Misalnya, keberadaan hak-hak asasi manusia tidak datang dari undang-undang yang dibuat oleh penguasa negara. Hak-hak ini sudah ada tak kala manusia lahir. Hak ini sudah ada bahkan mendahului keberadaan suatu negara. Di sini hukum diidentikkan dengan moralitas.

Hukum juga bisa bermakna lembaga-lembaga negara dan aparat (petugas) yang menjalankan lembaga-lembaga itu. Seorang polisi yang sedang berpatroli di jalan, dapat saja dilihat sebagai hukum bagi masyarakat pengguna jalan. Dengan hadirnya polisi di satu tempat, masyarakat melihat di situ ada hukum. Di ruang pengadilan, figur hakim dan jaksa juga bisa menjadi representasi dari hukum. Demikian pula dengan figur presiden, menteri, anggota parlemen, dan seterusnya. Lembaga-lembaga negara yang mereka pimpin dapat dicermati sebagai pembuat, pelaksana, dan pengawas bekerjanya hukum, sehingga mereka sering dianggap sebagai hukum pula.

Hukum juga dapat diartikan sebagai perilaku yang dilakukan berulang-ulang, sehingga menjadi adat dan kebiasaan. Jadi, sekalipun tidak terdapat campur tangan negara dalam pembentukan adat dan kebiasaan

ini, masyarakat ternyata menaatinya sebagai hukum. Untuk itu dikenal apa yang disebut hukum adat dan hukum kebiasaan.

Selain dapat dibentuk oleh negara, hukum juga dapat dibuat oleh orang perorangan. Perjanjian yang dibuat oleh dua orang, pada hakikatnya juga hukum bagi kedua belah pihak. Apabila pihak-pihak ini di kemudian berselisih tentang perjanjian mereka, maka ketentuan-ketentuan di dalam perjanjian itu dijadikan sebagai tolak ukur untuk menilai siapa dari kedua pihak itu yang benar dan salah menurut hukum perjanjian.

Dari ilustrasi singkat di atas dapat dinyatakan bahwa hukum memang mempunyai banyak makna. Walaupun demikian, semua hukum itu pada dasarnya mengatur hal yang sama, yaitu hak dan kewajiban bagi orang-orang yang bersangkutan dengan hukum. Orang-orang yang menjadi penyanggah hak dan kewajiban ini disebut sebagai subjek hukum. Penyanggah hak dan kewajiban atau subjek hukum tersebut dapat terdiri dari manusia alami, tetapi bisa juga berupa organisasi (institusi) buatan manusia. Sebuah perusahaan yang didirikan oleh para pelaku usaha, misalnya, adalah subjek hukum di luar manusia karena perusahaan itu adalah juga penyanggah hak dan kewajiban. Perusahaan dapat lahir dan mati (bubar atau dipailitkan) seperti halnya manusia alami.

B. PENGERTIAN SISTEM HUKUM¹

Terlepas dari banyaknya makna dan bentuk hukum itu, tidak bisa dihindari bahwa semua hukum itu harus hadir sebagai suatu tatanan. Dalam sebuah negara yang berdaulat secara hukum, negara itu harus menjaga agar berlaku suatu tata hukum yang memberi keadilan, kepastian, dan kemanfaatan bagi semua subjek hukum yang ada di negara itu. Tata hukum yang berlaku tersebut disebut dengan istilah “hukum positif”.

Jadi, hukum sebenarnya merupakan suatu tatanan atau suatu sistem. Secara sederhana, “sistem” berarti perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas,² atau “*Group of things or part working together in a regular relation.*”³ Definisi yang

1 Beberapa bagian dari tulisan ini dielaborasi kembali dari Shidarta, “Kerangka Berpikir Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan dalam Pengelolaan Pesisir,” dalam Jason M. Patlis, *et al.*, Menuju Harmonisasi Sistem Hukum sebagai Pilar Pengelolaan Wilayah Pesisir Indonesia, (Jakarta: Bappenas, DKP, Depkumham, CRMP/Mitra Pesisir, 2005), hlm. 8-87.

² Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Ed. 3 (Jakarta: Balai Pustaka, 1982), hlm. 1076.

³ A.S. Hornby *et al.*, *The Advance Learner's Dictionary of Current English*, Ed. 2, (London: Oxford University Press, 1973), hlm. 1024.



kurang lebih sama diberikan oleh *Black's Law Dictionary*, yang mengartikan sistem sebagai “*Orderly combination or arrangement, as of particulars, parts, or elements into a whole; especially such combination according to some rational principle.*”⁴

Banyak unsur-unsur yang terjalin dalam suatu sistem. Hal ini terlihat pada hukum sebagai suatu sistem. Sudikno Mertokusumo mengibaratkan sistem hukum sebagai gambar mozaik, yaitu gambar yang dipotong-potong menjadi bagian-bagian kecil untuk kemudian dihubungkan kembali, sehingga tampak utuh seperti gambar semula. Masing-masing bagian tidak berdiri sendiri lepas hubungannya dengan yang lain, tetapi kait mengait dengan bagian-bagian lainnya. Tiap bagian tidak mempunyai arti di luar kesatuan itu. Di dalam kesatuan itu tidak dikehendaki adanya konflik atau kontradiksi. Kalau sampai terjadi konflik, maka akan segera diselesaikan oleh dan di dalam sistem itu sendiri.⁵

Berbicara tentang hukum sebagai suatu sistem berarti berbicara tentang sesuatu yang berdimensi sangat luas. Secara mudah sistem hukum dapat dibedakan menjadi tiga komponen, yakni: (1) struktur hukum, (2) substansi hukum, dan (3) budaya hukum.

Komponen pertama adalah struktur hukum. Menurut Lawrence M. Friedman, yang dimaksud dengan suatu struktur sistem hukum adalah:⁶

Struktur hukum di sini berupa lembaga-lembaga negara, baik yang ada di jajaran legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Di dalam lembaga itu bekerja para aparatur negara dan pemerintahan yang menjadi tulang punggung bekerjanya sistem hukum Indonesia. Bahkan, perkembangan dewasa ini dapat pula memasukkan lembaga-lembaga yang didirikan oleh masyarakat, seperti perusahaan pers dan lembaga swadaya masyarakat (organisasi non-pemerintah) yang telah mendapat pengakuan sebagai pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam sistem hukum

⁴ Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, Ed. 6, (St. Paul: West Publishing, 1990), hlm. 1450.

⁵ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Ed. 3, (Yogyakarta: Liberty, 1991), hlm. 102-103.

⁶ Lawrence M. Friedman, *American Law: An Introduction*, (New York: W.W. Norton & Co., 1984), hlm. 5.



Indonesia. Setiap lembaga di atas memiliki peran sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Komponen kedua dari sistem hukum adalah substansi, yaitu “... *the actual rules, norms, and behavior patterns of people inside the system*.”⁷ Definisi ini menunjukkan pemaknaan substansi hukum yang lebih luas daripada sekadar stelsel norma formal (*formeel normenstelsel*). Friedman memasukkan pula pola-pola perilaku sosial dan norma-norma sosial selain hukum, sehingga termasuk juga etika sosial seperti asas-asas kebenaran dan keadilan. Jadi, yang disebut komponen substansi hukum di sini adalah semua asas dan norma yang dijadikan acuan oleh masyarakat dan pemerintah.

Sekalipun substansi hukum itu ada yang tertulis dan tidak tertulis, tetap harus berakar pada pandangan hidup (falsafah) tertinggi yang diakui di negara Republik Indonesia. Pandangan hidup inilah yang menjadi esensi dari semua substansi hukum itu. Untuk konteks Indonesia, falsafah ini disebut Pancasila. Fungsinya adalah sebagai “bintang pemandu” (*Leitstern*) bagi penciptaan dan penerapan sistem hukum Indonesia.

Komponen ketiga dari sistem hukum adalah budaya hukum, yang diartikan oleh Friedman sebagai:⁸

Budaya hukum juga dapat diberikan batasan yang sama dengan kesadaran hukum.⁹ Konsep “kesadaran hukum” ini dibedakan oleh J.J. von Schmid dengan konsep “perasaan hukum.” Menurutnya, perasaan hukum merupakan produk penilaian masyarakat secara spontan yang tentu saja bersifat subjektif, sedangkan kesadaran hukum lebih merupakan hasil pemikiran, penalaran, dan argumentasi yang dibuat oleh para ahli, khususnya ahli hukum. Kesadaran hukum adalah abstraksi (para ahli) mengenai perasaan hukum dari para subjek hukum. Dalam konteks pembicaraan tentang sistem hukum ini, tentu saja yang dimaksud dengan budaya hukum ini adalah kesadaran hukum dari subjek-subjek hukum suatu komunitas secara keseluruhan.¹⁰

⁷ *Ibid.*, hlm. 6.

⁸ *Ibid.*

⁹ Darji Darmodiharjo & Shidarta, *Penjabaran Nilai-Nilai Pancasila dalam Sistem Hukum Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996), hlm. 154.

¹⁰ J.J. von Schmid, *Het Denken over Staat en Recht in de Tegenwoordige Tijd* (Haar-



Jadi, budaya hukum tecermin dari cara berpikir dan bertindak para subjek hukum itu. Ada budaya hukum yang berlaku di dalam kelompok subjek hukum yang bekerja sebagai penyanggah profesi hukum, seperti budaya hukum di kalangan hakim, jaksa, polisi, atau advokat. Budaya hukum dalam lingkup profesional hukum ini sering disebut budaya hukum internal. Ada pula budaya hukum di dalam masyarakat luas, yang mencakup masyarakat pada umumnya di luar penyanggah profesi hukum. Budaya hukum ini disebut budaya hukum eksternal.¹¹

Tiga komponen sistem hukum yang dikemukakan Friedman di atas, memiliki kemiripan dengan pandangan Kees Schuit. Menurutnya, sebuah sistem hukum terdiri dari tiga unsur yang memiliki kemandirian tertentu (identitas dengan batas-batas yang relatif jelas) yang saling berkaitan, dan masing-masing dapat dijabarkan lebih lanjut. Unsur-unsur yang mewujudkan sistem hukum itu adalah:¹²

- a. *Unsur idiil*. Unsur ini terbentuk oleh sistem makna dari hukum, yang terdiri atas aturan-aturan, kaidah-kaidah, dan asas-asas. Unsur inilah yang oleh para yuris disebut “sistem hukum”. Bagi para sosiolog hukum, masih ada unsur lainnya.
- b. *Unsur operasional*. Unsur ini terdiri atas keseluruhan organisasi-organisasi dan lembaga-lembaga, yang didirikan dalam suatu sistem hukum. Yang termasuk ke dalamnya adalah juga para pengemban jabatan (*ambtsdrager*), yang berfungsi dalam kerangka suatu organisasi atau lembaga.
- c. *Unsur aktual*. Unsur ini adalah keseluruhan putusan-putusan dan perbuatan-perbuatan konkret yang berkaitan dengan sistem makna dari hukum, baik dari para pengemban jabatan maupun dari para warga masyarakat, yang di dalamnya terdapat sistem hukum itu.

Untuk mempermudah pemahaman, ketiga komponen sistem hukum itu dapat digambarkan dalam ragaan sebagai berikut.

lem: De Erven F. Bohn, 1965), hlm. 63 dikutip oleh C.F.G. Sunaryati Hartono, *Peranan Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Pembaharuan Umum* (Bandung: Binacipta, 1976), hlm. 3.

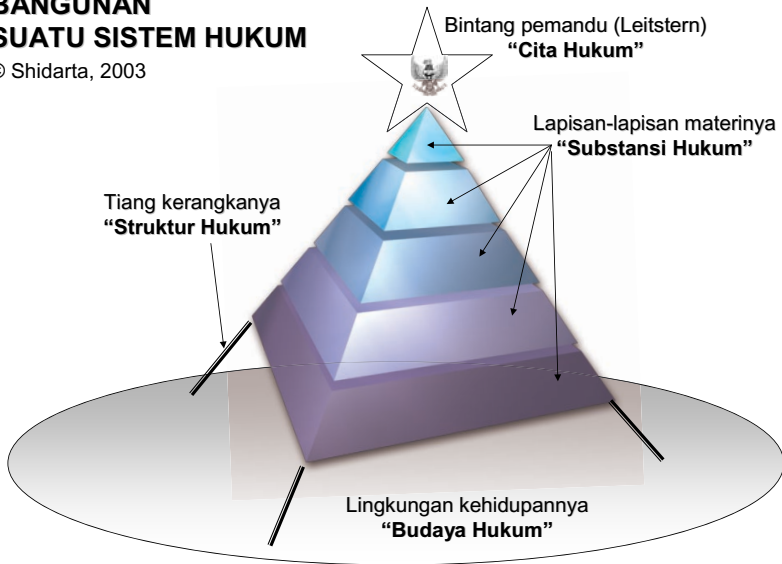
¹¹ Lawrence M. Friedman, *Op. cit.*

¹² J.J.H. Bruggink, *Refleksi tentang Hukum*, terjemahan B. Arief Sidharta, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), hlm. 140.



BANGUNAN SUATU SISTEM HUKUM

© Shidarta, 2003



RAGAAAN 1.1. Bangunan Suatu Sistem Hukum

Demikianlah, berarti sistem hukum Indonesia juga dapat dilihat sebagai kumpulan dari tiga komponen tersebut. Kita tidak mungkin berbicara tentang sistem hukum Indonesia tanpa mengaitkan ketiganya sekaligus. Namun, jika kita ingin mengkritik sistem hukum Indonesia, kita perlu menelaah secara analitis unsur mana dari sistem hukum itu yang akan dikritik. Boleh jadi, substansi hukumnya tidak bermasalah, namun aparat penegak hukumnya yang bermasalah, atau pola perilaku masyarakat yang justru menjadi biang permasalahan.

C. LATAR BELAKANG SEJARAH SISTEM HUKUM INDONESIA

Secara yuridis formal, sistem hukum nasional Indonesia dinyatakan mulai ada sejak tanggal 17 Agustus 1945. Namun substansi, struktur, dan budaya hukum yang telah ada sebelum Proklamasi Kemerdekaan, tidak dapat diabaikan begitu saja dalam menentukan wujud sistem hukum Indonesia itu di kemudian hari. Demi mencegah kekosongan (kevakuman) hukum, warisan peraturan perundang-undangan era sebelum kemerdekaan dinyatakan tetap berlaku. Hal ini dipertegas dengan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, yang *notabene* konstitusi tersebut mulai berlaku per tanggal 18 Agustus 1945.

Tidak dapat dimungkiri, pengaruh sistem hukum kolonial Belanda sangat kuat berakar dalam sistem hukum nasional Indonesia yang baru

